TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN.Sby)

SKRIPSI

Oleh Fitrotul Umami NIM. C03213020



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fitrotul Umam

NIM

: C03213020

Semester

: XI

Jurusan/ Prodi/ Fakultas

: Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/

Syariah dan Hukum

Judul Skripsi

:Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap

Pencurian Yang Dilakukan Oleh Penyandang

Disabilitas (Studi Putusan No. 2607/

Pid.B/2017/PN.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Januari 2019

TERAT

D19AFF440

TOLUMAN RIBURUPIAH

NIM. C03213020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Umami NIM: C03213020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2019

Pembimbing Skripsi,

<u>Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc.,M.Ag.</u> NIP 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Umami NIM C03213020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 07 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag NIP.197904162006042002 Penguji III,

M. Romdlon, SH,M Hum NIP.196212291991031003

Penguji II,

Muh. Sholihuddin, MHI. NIP.1977072520088011009 Penguji IV,

Agus Solikin, M.S.I

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 8 Februari 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di ba	wah ini, saya:
Nama	: Fitrotul Umani	
NIM	:_C03213020	
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik	Klan.
E-mail address	: Fitrotuluruamigg @gnail.com	
UJN Sunan Ampel Sekripsi yang berjudul: Tingalan H	igan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepadi Il Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmia Il Tesis III Desertasi III Lain-lain (nh :)
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menakademis tanpa p	t yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti N N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-medalam bentuk pangkalan data (database), mendistribus mpublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untur berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan namdan atau penerbit yang bersangkutan.	dia/format-kan, sikannya, dan uk kepentingan
Saya bersedia unt Sunan Ampel Sura dalam karya ilmiah	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perp abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelangg n saya ini.	pustakaan UIN aran Hak Cipta

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19, februari, 2019.

Filtroful Uniouii nama terang dan tanda tangan

)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang Dilakukan oleh Orang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY?, serta bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyadang disabilitas terhadap putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.

Data penelitian dihimpun melalui kajian dokumen, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *editing organizing* dan *analising* yang selanjutnya akan dianalisis mengunakan teknik deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pencurian yang dilakukan orang penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY., menyatakan bahwa tersangka merupakan penyandang disabilitas kapasitas intelegensi pada kapasitas retardasi mental ringan dengan gangguan intelektual, sehingga Hakim memutuskan status hukum tersangka dengan keputusan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum Hal ini juga didasarkan pada hasil pemeriksaan Ahli Psikologi, yang menyatakan bahwa Agustinus Dwijo Widodo memiliki kapasitas intelegensi pada kapasitas retardasi mental ringan, secara fisik tampak normal, namun rendahnya fungsi intelektual umum yang terja<mark>di dalam periode</mark> perk<mark>em</mark>bangan dan berkaitan dengan salah satu atau lebih diantara faktor (1) kemasakan, (2) kemampuan belajar, (3) penyesuaian sosial.. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang penyandang disabilitas terhadap dilakukan orang putusan 2607/Pid.B/2017/PN.SBYMaka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal : (1) Adanya perbuatan yang dilarang (2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri (3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an- Nur, ayat 59, bahwa: "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa". Berdasarkan hal tersebut putusan bebas terhadap Agustinus Dwijo Widodo telah sesuai dengan konsep hukum pidana islam.

Sejalan dengan simpulan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menambah kasanah pengetahuan berkaitan dengan pengklasifikasian pelaku pidana terutama cara pandang terhadap pelaku pidana, sehingga sedikit banyak hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam. Masyarakat lebih mengkaji lagi, dalam praktek sosial masyarakat sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

DAFTAR ISI

SAMPUL 1	DALAMi					
PERNYAT	'AAN KEASLIANii					
PERSETU.	PERSETUJUANPEMBIMBINGiii					
PENGESA	HANiv					
	AHANv					
	vi					
	vii					
	NGANTARviii					
DAFTAR I	SIxii					
DAFTAR	TRANSLITERASIxv					
	IDAHULUAN COMPANY COMP					
	Latar Belakang Masalah1					
	Identifikasi dan Batasan Masalah8					
	Rumusan Masalah9					
D.	Tujuan Penelitian9					
E.	Kegunaan Penelitian					
F.	Kajian Penelitian10					
G.	Definisi Operasional					
H.	Metode Penelitian					
I.	Sistematika Pembahasan					
	NJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SARIQAH DAN UNSUR ARIMAH PENCURIAN					
A.	Konsep Sariqah					
	1. Pengertian					
	2. Syarat dan Had Pencuri					
	3. Dampak Negatif Perbuatan Mencuri					
	4. Pengertian Jarimah Pencurian					
	5. Syarat-Syarat Jarimah Pencurian23					
	6. Sanksi Jarimah Pencurian24					

7	Cara Pembuktian Jarimah Pencurian2	27
8	. Pengklasifikasian Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam2	28
В. Т	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian3	30
1.	Pengertian Tindak Pidan Pencurian	30
2.	Jenis-Jenis Pencurian	31
3.	Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pencurian3	35
C. 1	Kajian Umum Penyandang Disabilitas3	38
-	1. Pengertian Penyandang Disabilitas	38
	2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas3	39
3	3. Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas4	11
	a. Undang-Undnag Tentang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-	
	Hak Penyandang Disabilitas	11
	b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang	
	Disabilitas4	12
•	c. Pemeriksa <mark>an</mark> Pelaku Disabilitas dalam Perkara Pidana4 ANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA PUTUSAN NO.2607/PID.B/2017/PN.SBY	13
Α. (Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya4	15
-	1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Surabaya4	15
2	2. Daftar Nama Hakim dan Pejabat Struktural4	17
	Deskripsi Kasus dalam Putusan No.2607/Pid.B/2017/PN.Sby41. Biodata Terdakwa	
2	2. Kronologi Kasus4	19
C. 1	Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Pada Putusan	
]	Pengadilan Negeri Surabaya No. 2607/Pid.B/2017/PN.Sby Tentang	
	Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Penyandang	
]	Disabilitas5	51
D. 7	Amar Putusan5	56

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.2607/PID.B/2017/PN.SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS

A.	Analisis	Pertimbangan	Hakim	terhadap	Putusan	No.
	2607/Pid.l	B/2017/PN.Sby	Tentang	Tindak Pio	dana Penc	urian
	Yang Dila	kukan Oleh Pen	yandang D	Disabilitas		58
		/ /				
В.	Analisis	Hukum Pidan	a Islam	terhadap	Putusan	No.
	2607/Pid.l	B/2017/PN.Sby	Tentang	Tindak Pio	dana Penc	urian
	Yang Dila	kukan Oleh Pen	yand <mark>an</mark> g D	Disabilitas		62
BAB V PENU	TUP					
A.	Kesimpula	an				65
B.	Saran					65
DAFTAR PU	STAKA			,		67
LAMPIRAN						



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia memandang, bahwa pertumbuhan sosial ekonomi dan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan yang positif atau berbanding searah. Suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang sosial ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin canggih suatu teknologi, semakin tinggi tingkat kejahatan. Karena itu, penegakkan hukum pun dituntut untuk menggunakan teknologi.

Masalah sosial ekonomi berkembang luas di masyarakat modern. Semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa, semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang tanpa keseimbangan semangat kemanusiaan akan berakibat pada akses yang negatif. Akses ini muncul dari suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang disalahgunakan. Perwujudan suatu perbuatan yang jahat merupakan bentuk tindak pidana yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian, baik materiil maupun inmaterial. Kerugian ini dinilai cukup besar bagi masyarakat, bahkan kehidupan negara.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian ini terjadi dengan berbagai macam bentuk. Perkembangannya semakin kompleks. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pencurian. Selain itu, pelaku tindak pidana pun semakin beragam: dari anak-anak hingga orang dewasa, dari orang normal sampai orang penyandang disabilitas.

Difabilitas dan difabel atau disabilitas merupakan istilah yang baru dikenal dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Dalam kenyataannya, difabilitas tidak menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun, disabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.

Disabilitas merupakan istilah yang baru. Sebelumnya, kata yang digunakan adalah penyandang cacat. Penyandang cacat merupakan istilah yang banyak digunakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah selama belasan tahun. Pengertian penyandang cacat diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, "Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya".

Pada tahun 2016, Undang-undang Penyandang Cacat tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah "cacat" diganti dengan "Disabilitas". Dalam Undang-

undang No. 8 tahun 2016 tersebut, penyandang disabilitas adalah "Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya dimunculkan. Persoalannya terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, banyak hak tercabut. Dukungan sistem peradilan sangat minim. Dengan kata lain, saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, ia menjadi diskriminasi.

Penyandang disabilitas beragam. Ia tergantung pada jenis disabilitasnya. Hal ini membutuhkan sarana dan prasarana serta proses komunikasi yang berbeda sesuai dengan hambatan yang terjadi. Permasalahan lain yang ditemui adalah pengetahuan penegak hukum. Tidak sedikit di antara para penegak hukum belum memahami tentang penyandang disabilitas. Rintangan yang dihadapi dan kebutuhannya saat berproses di pengadilan juga belum dimengerti. Pengetahuan penegak hukum terkait disabilitas tergambar dalam beberapa fakta sebagai berikut¹.

-

¹ M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigab, 2014), 105-126.

Pertama, kasus pidana seorang tuna rungu yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum. Kedua, laporan pidana seorang penyandang disabilitas netra kerap tidak diproses oleh penegak hukum, karena korban tidak bisa melihat pelaku pemerkosaan. Ketiga, kasus seorang tuna rungu tidak diproses di peradilan, karena penyidik seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab. Penyidik tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada penerjemah. Keempat, penegak hukum kerap merendahkan martabat penyandang disabilitas.

Banyak sikap yang salah terkait dengan penyandang disabilitas. Penegak hukum dan norma hukum masih memperlakukannya sebagai kumpulan orang yang tidak mampu, tidak normal, di bawah pengampuan, dan tidak cakap hukum. Secara otomatis, penyandang disabilitas menjadi korban dari proses pengadilan. Dalam hal ini, bidang hukum Islam yang bisa berperan untuk mencegahnya adalah fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah hukum yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan kronologisnya. Ia juga membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Fiqh jinayah membahas pula upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan yang disertai dengan teori-teori tentang sanksi hukum. Kejahatan atau tindak pidana dalam fiqh jinayah disebut sebagai *jarimah*. Dari segi bahasa, *jarimah* merupakan kata kejadian (masdar) dengan asal kata *jarama*. Kata ini memiliki arti berbuat salah, sehingga *jarimah* berarti perbuatan salah.

Dalam fiqh jinayah, istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarimah*, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan sanksi hukum, baik *had* ataupun *ta'zir*. Larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²

Suatu perbuatan dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan nama formil (al-rukn al-ayr'i).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur materiil (*al-rukn al-maddi*).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif* artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al rukn al-adabi*).³

Konsep Jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya suatu larangan, maka keberadaan dan

.

² Juhaya S. Praja dan Ahmad Sihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, tt),77

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Larangan untuk sesuatu dapat dipertahankan bila disertai kronologis (hukuman).

Dalam fiqh jinayah, jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama menjadi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar itu maka para ulama membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1. Jarimah hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah).
- 2. Jarimah qisas/diyat, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata.
- 3. Jarimah takzir yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman hadd atau kafarat dan tidak ditentukan kronologisnya oleh al-Qur'an dan Hadits. Jarimah takzir terbagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Jarimah hudud atau qisas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
 - b. Jarimah-jarimah yang sudah ditentukan al-Qur'an dan Hadits namun tidak ditentukan kronologisnya.

c. Jarimah-jarimah yag sudah ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman-hukuman tersebut, yaitu sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman takzir, antara lain:⁴

- 1. Hukuman mati
- 2. Hukuman jild
- 3. Hukuman kawalan (penjara kurungan)
- 4. Hukuman salib
- 5. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan (al-Wa'dhu).
- 6. Hukuman pengucilan (al-hajru), dan
- 7. Hukuman denda (al-Gharamah).

Peristiwa pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Bahwa terdakwa Agustinus Dwijo Widodo bin Jc. Maniso pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bahwa terdakwa melakukan tindak pencuriaan dua buah jam tangan merk Etinne Aigner Dan Merk Citizen, bertempat di perum IKIP Gununganyar Indah blok C No. 100 Kec. Gununganyar. Terdakwa diperintah menjaga rumah saksi korban pada saat saksi korban berlibur ke Australia dan pembantu saksi korban pulang mudik lebaran. Atas perbuatan terdakwa, saksi

.

⁴ A. Djazuli, *Figh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 30.

korban Moch. Oloan Ritonga menderita kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agustinus Dwijo Widodo bin Bc. Maniso, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Sedangkan dalam konsep sariqah pelaku tersebut harus diberi hukuman potong tangan.

Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY)".

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dengan kondisi pelaku penyandang disabilitas tersebut, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas.
- b. Dari segi putusan pengadilan, hakim masih belum optimal, sehingga masih banyak terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
- c. Dari segi kronologisnya, baik kronologis dari hukum positif maupun hukum Islam dan kronologis kurang memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memberikan batasan permasalahan pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penyandang disabilitas yang itu melihat pada putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY dan bagaimana tinjauan dari hukum pidana Islam itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

 Untuk menggambarkan pertimbangan hakim terhadap pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas menurut putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut.

- Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam, terutama disiplin ilmu pidana Islam. Selain itu, ia juga bisa dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian berikutnya.
- Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam mengatasi masalah pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

F. Kajian Pustaka

tindak pidana pencurian yang Studi tentang dilakukan oleh penyandang disabilitas telah dipublikasikan dalam beberapa karya ilmiah. Di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Qonita Nuril Ula pada Jurusan Hukum Pidana Islam Tahun 2016. Skripsi ini berjudul "Analisis Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengadilan Pencabulan (Studi Putusan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska.). Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas yang memperoleh sanksi penjara selama 10 bulan. Dalam kasus ini, pidana tersebut tidak dijalani, kecuali dengan perintah hakim. Terdakwa dapat dikenakan penjara selama 1 tahun 6 bulan sebelum lewat masa percobaan. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan, bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak masa depan orang lain. Hukuman ini telah sesuai dengan asas *the best interest of child*, yakni terdakwa diberikan putusan yang mengutamakan kesejahteraan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, terdakwa diancam dengan hukuman takzir *ta'dibiyah* (pengajaran). Sanksi yang diberikan Hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena hukuman tersebut merupakan bentuk pendidikan atau pengajaran terhadap terdakwa.⁵

Karya ilmiah lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Noer Shofiyanah jurusan Muamalah Jinayah tahun 1999 dengan judul "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Bagi Pengidap Kleptomania Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana". Pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania menurut hukum pidana termasuk salah satu hal yang tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengidap kleptomania ini merupakan bagian dari kelainan jiwa yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Menurut hukum Islam,pelaku tindak pidana pencurian tersebut tetap dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan, orang tersebut termasuk orang mukallaf. Menurut hukum Islam, pelaku tindak pidana pencurian diancam dengan hukuman had. Jika semua syarat dan rukun tindak pidana

.

⁵ Qonita Nuril Ula, "Analisis Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)", *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

pencurian terpenuhi atau terdapat *subhat* padanya, maka ia dikenai hukuman takzir.⁶

Dalam hal ini, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada segi bentuk kejahatannya dan orang yang melakukannya atau pelaku kejahatan tersebut. Dalam kasus penelitian ini, pencurian dilakukan oleh penyandang disabilitas, sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada perbuatan pencabulan. Denikian pula, penelitian ini terfoksus pada kasus penyandang disabilitas, sedangkan penelitain terdahulu mengarah pada pelaku pengidap Kleptomania.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY)", dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul terebut sebagai berikut:

 Hukum Pidana Islam: segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal tindak pidana atau perbuatan kriminal yang

⁶ Noer Shofiyanah, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Bagi Pengidap Kleptomania Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana", *Skripsi* (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999).

dilakukan orang-orang *mukallaf* (subyek hukum) sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadits dan pendapat ulama fiqh⁷, yang menjelaskan terhadap kronologis jarimah takzir.

- 2. Pencurian: Suatu urutan rangkaian peristiwa yang terjadi yang berisi penjelasan dari kejadian dalam urutan waktu dimana hal itu terjadi.⁸
- 3. Disabilitas: Setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 4. Putusan Pengadilan: Yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁹

Dari definisi di atas, penulis fokus pembahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (studi putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY).

H. Metode Penelitian

-

⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 06

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), *55*.

⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1986), 4

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. 10

1. Identifikasi Data

Adapun data yang dapat di identifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang pencurian yang terdapat dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.
- b. Data yang terdapat pada hukum pidana Islam dalam figh jinayah.

2. Sumber Data

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat (sosio legal research), maka penelitian ini membutuhkan data pokok baik data primer yang berasal dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari "bahan hukum".

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan pencurian. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri atas orang-orang

-

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3

yang melaksanakan aturan kebijakan tersebut, dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis adalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitia tidak akan mendapatkan data yang memnuhi standar data yang ditetapkan.¹¹

a. Studi Dokumenter

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi¹². Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 224.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Cetakan Keempat*, (Jakarta; Kencana, 2014), 45.

wawancara (*guided interview*) sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mendiskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang teori mukalaf kepada permaalahan yang bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Suarabaya No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori. Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan kejadian tersebut, kemudian berupaya menemukan pola dan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menerbitkan setiap kebijakan yang terkait dengan kejadian tersebut. Sehingga diharapkan pola yang ditawarkan diharapkan mampu memberikan solusi terbaik bagi pihakpihak yang terkait.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal –hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar terdiri dari lima bab.

Bab Pertama terfokus pada permasalahan. Permasalahan ini muncul dari latar belakang masalah. Dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dapat dirumuskan. Selain itu, permasalahan juga menjadi referensi untuk mengexsplorasi studi-studi terdahulu. Berangkat dari permasalahan pula, metode penelitian dengan penentuan data dapat dikemukakan.

Bab Kedua membahas dan menguraikan tinjauan umum tentang konsep sariqah dan unsur jarimah pencurian. Dari kedua pembahasan ini, beberapa dimensi dan pengertiannya dapat dijelaskan secara lengkap. Pembahasan ini diperlukan untuk mempermudah penggalian data di lapangan serta menganalisis temuan yang telah diperoleh.

Bab Ketiga membahas penyajian data dengan pemaparan data-data yang telah diperoleh di lapangan. Data-data ini dikelompokkan menurut katagori tertentu. Pengelompokan ini menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.

Bab Keempat menganalisis mengenai sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas menurut hukum Islam dan dasar hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.

Analisis ini menghasilkan temuan-temuan dari kombinasi antara teori dan data lapangan.

Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikemukakan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah. Sementara itu, saran-saran dirumuskan berdasarkan kegunaan teoritis maupun praktis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SARIQAH DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISABILITAS

A. Konsep Sariqah

A. Pengertian Sariqah

Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (*syubhat*) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹³

Dalam bukunya, Sayid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencuri adalah mengambil milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kemudian ada juga pengertian umum mencuri berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan di tempat yang wajar untuk menyimpan atau tidak.

¹³ Rizka Umami, *Makalah: Mencuri dalam Syari'at Islam* (https://zkamiye.blogspot.com), 17 Juni 2013

Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud mencuri adalah mengambil harta orang lain yang terjaga atau tidak dari tempat penyimpanannya, dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak syubhat. Mencuri hukumnya adalah haram, dan dalam hadits dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang.

Artinya: "Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri". (H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah)

B. Syarat dan Had Mencuri

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai mencuri apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Orang yang mencuri adalah mukallaf, yaitu sudah baligh dan berakal.
- b. Pencurian itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Orang yang mencuri sama sekali tidak memiliki andil terhadap barang yang dicuri.
- d. Barang yang dicuri adalah benar-benar milik orang lain.
- e. Barang yang dicuri mencapai jumlah nisab.

f. Barang yang dicuri berada di tempat penyimpanan atau di tempat yang layak.

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat di atas maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mencuri, dan juga tidak dapat dijatuhi had mencuri. Had mencuri atau hukuman di dunia bagi pencuri adalah potong tangan. Firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 38:

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

C. Dampak Negatif Perbuatan Mencuri

Terdapat hukum sebab akibat yang selalu mengikuti suatu perbuatan yang dilakukan, tanpa terkecuali perbuatan tercela mencuri. Dampak negatif perbuatan mencuri tidak hanya bagi pelaku pencurian, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Dampak negatif mencuri adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku

- Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar trasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar.
- 2) Mendapat hukuman, apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.

- Mencemarkan nama baik dan keluarga, seseorang yang telah terbukti mencuri nama baik dirinya dan keluarga akan tercemar di mata masyarakat.
- 4) Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat maka ia akan mendapat azab yang pedih.

b. Bagi Korban dan Masyarakat

- Menimbulkan kerugian dan kekecewaan, peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya.
- 2) Menimbulkan ketakutan, peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam.
- 3) Munculnya hukum rimba, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba dimana yang kuat akan memangsa yang lemah.

D. Pengertian Jarimah Pencurian

Dalam banyak kesempatan fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti "memetik buah dari pohonnya". Orang yang

berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna 'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir." Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut: "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya." 14

E. Syarat-Syarat Jarimah Pencurian

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam :

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur

.

¹⁴ Audah, Abdul Qadir. At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy. Dar Al Kitab Al Araby, Beirut. Juz 1.

umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus jarimah, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa.

F. Sanksi Jarimah Pencurian

Dalam tidak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah, ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja, sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka seakan-akan harta itu adalah miliknya.

Akan tetapi mazhab Hanafi pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada di tangan pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orangtersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, sanksi dang anti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak ini, jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Inila yang disebut dengan prinsip dhaman di kalangan ulama.

Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Hanya mereka berbeda pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada ditangan pencuri. Apakah pencuri itu hanya dikenai had saja, ataupun disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi? Adapun dasar hukum potong tangan terdapat firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 38:

Artinya: "Laki — laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan, jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh Ulul Amri.Berkenaan dengan anggota badan yang dipotong dan batas pemotongannya, para ulama berbeda pendapat.

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan, pada pencurian kedua yang dipotong adalah kaki kiri, pada pencurian yang ketiga yang dipotong adalah tangan kiri, pada pencurian ke empat yang dipotong adalah tangan kanan. Jika pencuri masih mencuri yang kelima kalinya maka dipenjara sampai dia bertobat.
- b. Atha berpendapat bahwa pencurian yang pertama dipotong tangannya, dan mencuri yang kedua kalinya dihukum ta'zir.
- c. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa pada pencurian pertama dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong tangan kirinya, pada pencurian ketiga dikenai hukuman ta'zir.
- d. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada pencurian pertama pencuri dipotong tangan kanannya, pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya, pencurian ketiga dipenjara sampai tobat.

Salah satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa kewajiban potong tangan itu dihapus, jika tangan yang akan dipotong itu telah hilang sesudah pencurian terjadi.

Batas pemotongan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad dan Zahiri adalah dari pergelangan tangan ke

bawah, begitupula bila yang dipotong kakinya. Alasannya adalah batas minimal anggota yang disebut tangan dan kaki adalah telapak tangan atau kaki dengan jari-jarinya. Selain itu Rasulullah melakukan pemotngan tangan pada pergelangan tangan pencuri.¹⁵

G. Cara Pembuktian Jarimah Pencurian

Cara pembuktian jarimah pencurian, diantaranya:

Dengan saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian sama halnya dengan jumlah saksi pada jarimah sariqah, yaitu minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Saksi bisa diambil dari para korban atau orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian perampokan.

Dengan pengakuan

Pengakuan seorang pencuri merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana perampokan. Menurut Jumhur Ulama pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Akan tetapi menurut pendapat Imam Abu Yusuf dan Hanabilah bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali. 16

¹⁶ M. Nurul Irfan. Fiqih Jinayah. (Jakarta: Amzah. 2013). Hlm. 113-114

¹⁵ H.A.Dzajuli. Fiqih Jinayah. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997). Hlm. 80-84

H. Pengklasifikasian Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam

a. Unsur Formal Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (tindak pidana) apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini disebut unsur formal jarimah. Dalam membicarakan unsur formal ini, terdapat lima masalah pokok sebagai berikut :

- Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
 Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.
- 2) Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas.
- Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam
 Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya
 peraturan hukum Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak
 berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu
 dikeluarkan.
- 4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian, yaitu Negeri Islam dan Negeri Bukan Islam.

5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Hukum pidana syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan tingkatan manusia. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, dan sebagainya.

b. Unsur Materiil Jarimah

Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat.

1) Percobaan melakukan jarimah

Untuk mengetahui sampai dimana suatu perbuatan percobaan dapat dihukum maka terdapat tiga fase pelaksanaan jarimah, yaitu fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan.

2) Turut serta melakukan jarimah

Turut serta melakukan jarimah itu ada dua macam yaitu turut serta secara langsung dan secara tidak langsung. Turut serta secara langsung terjadi apabila orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh

(menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

c. Unsur Pertanggungjawaban Jarimah

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

2. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe" akhiran "an". Menyatakan bahwa kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut (R. Soesilo 1995: 249):¹⁷

"Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Dalam pasal 362 KUHPidana ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mengambil suatu barang
- b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara
- d. Melawan hukum

2. Jenis-Jenis Pencurian

-

¹⁷ Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, (Bogor: Politea, 1995), 249

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHPidana yang diatur daam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Istilah "pencurian biasa " digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian "pencurian dalam arti pokok". Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

"Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsurunsur pencurian biasa adalah :

- 1) Perbuatan Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Melawan hukum
- b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doctrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan".

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian

yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikaskan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah : Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana dan Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana yang meliputi;

- 1) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana)
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana)
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana)

- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana)
- 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana)

c) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsurunsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang menentukan:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.900.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana, maka unsurunsur pencurian ringan adalah :

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
- b. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersamasama; atau

c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, jika tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seseorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

3. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang di ajukan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan alasan tersebut di namakan alasan penghapusn pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama di tujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah di atur dalam undang- undang, akan tetapi tidak di pidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai pelaku penentu apakah

telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti di rumuskan dalam alasan penghapusan pidana.

Dengan demikian alasan penghapusan pidana adalah alasan- alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak di pidana. Dan merupakan kewenangan yang di berikan undang- undang kepada hakim. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan tentang penuntutan alasan penghapusan pidana itu di putuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan perbuatan tersebut hapus, karena ada ketentuan undang- undang yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk undang- undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam buku I KUHP. Serta KUHP sendiri tidak memberi pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapusan pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku ke I bab tiga terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal- hal yang menghapus pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Khusus mengenai dasar penghapusan pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut¹⁸:

- a. Pasal 44 KUHP tentang kemapuan bertanggung jawab
- b. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa dan keadaan terpaka

-

¹⁸ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 27

- c. Pasal 49 KUHP tentang bela paksa
- d. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang- undang
- e. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah atasan

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang di sebut dengan alsan- alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atau alasan- alasan tidak dapat di pidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut¹⁹:

- a. Alasan tidak dapat di pertanggung jawabkannya seseorang terletak pada diri orang tersebut.
- b. Alasan tidak dapat di pertanggung jawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak di pidananya seseorang dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf, yang bersifat subyektif dan melekat pada diri seseorang, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat berbuat tindak pidana. Kedua dasar pembenar, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan di luar diri seseorang.

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar emaaf yaitu sebagai berikut

- b. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

_

¹⁹ *Ibid.*, 28

d. Hal yang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi unsur dalam undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum, akan tetapi akan bersangkutan tidak di pidana. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah pembelaan pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah di lakukan. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas, dan yang ke dua putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

C. Kajian Umum Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

-

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. ²¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. ²²

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan

.

²¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

- a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari :²³
 - 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievment*) yang diperoleh
- b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu : 24

²³ Reefani, Nur Kholis, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013), 17

²⁴ Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, 17

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- c. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

3. Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan, perlakuaan yang semenamena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ketentuan dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang hukum, tertuang dalam Pasal 13 yang mengatur tentang akses terhadap keadilan. Ketentuan ini mengharuskan Indonesia melakukan pengaturan yang memberikan akses yang baik bagi berhadapan penyandang disabilitas saat dengan hukum, meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan. Pasal 15 Konvensi mengatur penyandang disabilitas harus dapat dicegah dari perlakukan penyiksaan dan pengenaan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Maka pengaturan terhadap model penegakan hukum dan penghukuman terhadap anak penyendang disabilitas seperti dalam pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan dilakukan dalam perundang-undangan di Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang tentang penyandang disabilitas yang mengedepankan hak asasi manusia yang tidak diketemukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas sebelumnya. Undang-undang sebelumnya lebih banyak bernuansa diskriminatif sehingga hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana. Undang-undang ini memuat terutama pengaturan tentang hak dan perlindungan yang didapatkan anak apabila berhadapan dengan hukum. Amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi, memastikan apabila terdapat anak penyandang disabilitas, maka dalam kurun waktu tidak kurang dari enam bulan pelayanan di tempat penahanan atau lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan baik berupa sarana dan prasarana maupun obat-obatan yang melekat pada anak penyandang Termasuk penyediaan bagi kebutuhan khusus adalah memberikan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.

c. Pemeriksaan Pelaku Disabilitas dalam Persidangan Perkara Pidana

Pemeriksaan pelaku disabilitas dalam persidangan perkara pidana di pengadilan mengacu pada prinsip-prinsip pengadilan yang fair sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- d. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- e. Memperoleh p<mark>enyediaan aksesbilitas da</mark>lam pelayanan keadilan
- f. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiyaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambilan hak milik
- g. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dam di luar pengadilan dan
- h. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA PUTUSAN NO. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya

1. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya ini berada di Jl. Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya ini berdekatan dengan kampung ilmu dan Stasiun Pasar Turi. Pengadilan Negeri surabaya ini merupakan pengadilan kelas IA khusus. Dimana selain manjadi rumah pengadilan Umum, pengadilan ini juga menjadi rumah pengadilan bidang lain, seperti Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Tindak pidana Korupsi.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota.

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu: 1) Wilayah Surabaya Utara meliputi 4 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak, 2) Wilayah Surabaya Timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo, 3) Wilayah Surabaya Selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu: Kecamatan Sawahan. Kecamatan Wonokromo. Kecamatan Dukuh Pakis. Kecamatan Karang Kecamatan Wiyung, Kecamatan Wonocolo Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, 4) Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Simokerto, 5) Wilayah Surabaya Barat

meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemworo, Kecamatan Sukomanggal, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakel, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep.

2. Daftar Nama Hakim Dan Pejabat Struktural

Ketua : Heru Purnomo, SH., M. Hum

Wakil Ketua : Suwidya, SH., LLm

Hakim

- 1) Erry Mustianto, SH., MH
- 2) Lamsana Sipayung, SH., MH
- 3) Moestofa, SH., MH
- 4) H. Bambang Kusmumbar, SH., MH
- 5) Sigid Purwoko, SH., MH
- 6) H. Heru Mustofa, SH., MH
- 7) Suko Triyono, SH., MH
- 8) Hj. Deden Suryanti, SH., MH
- 9) Bambang Kustopo, SH., MH
- 10) Eko Sugianto, SH., MH
- 11) Unggul Ahmadi, SH., MH
- 12) Sriyatmo Joko Sungkowo, SH., MH
- 13) Dr Imade Sukadana, SH., MH
- 14) Bandung Suhermoyo, SH., M.Hum
- 15) Antonius Simbolon, SH., MH
- 16) Ach Fauzi, SH.,MH
- 17) Titik Tejaningsih, SH., MH
- 18) H. Yapi, SH., MH
- 19) Syarifudin Ainor Rofik, SH., MH
- 20) Ni Made Sudani, SH., M.Hum

21) Fatchurrochman, SH

22) Suhartoyo, SH., MH

Pansek : Darno, SH., MH

Wasek : Abdul Khamid, SH., MH

Wapan : Drs. H. Djamaludin ,D.N SH., MH

Panmud Hukum : Mashirah Widayati, SH., M.Hum

Panmud Perdata : Drs. Harij Wandoko, SH., MH

Panmud Pidana : H. Soedi, SH., MH

Kasubag Umum : Rully Ardijanto, SH., MH

Kasubag Keuangan : Retno Isminarsih. H, SH

Kasubag Kepegawaian : Sugeng Setyono, SH

B. Deskripsi Kasus dalam Putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.Sby

1. Biodata Terdakwa

Nama lengkap : Agustinus Dwijo Widodo Bin JC. Maniso

Tempat lahir : Surabaya

Umur Atau : 44 tahun/ 01 Agustus 1972

Tanggal Lahir

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Gg. III C No. 24/40 Rt. 05/01 Kec. Gunung

tinggal Anyar Surabaya

Agama : Katholik

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

2. Kronologi Kasus

Dari putusan pengadilan negeri Surabaya No. 2607/Pid. B/2017/PN.Sby ini terungkap bagaimana terdakwa Agustinus Dwijo Widodo mempertanggungjawabkan tindak pidananya yakni "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Terdakwa Agustinus Dwijo Widodo dikenal sebagai penyandang disabilitas dengan bukti pemeriksan yang dilakukan oleh Riza Wahyuni, S.Psi, Msi Psikolog dengan hasil sebagai berikut:

a. Kapasitas intenlegensi sdr. Agustinus dwijdjo widodo berada pada kapasitas reterdasi mental ringan, secara fisik tampak sehat dan normal, namun rendahnya fungsi intlektual umum yang terjadi dalam preode perkembangan dan berkaitan dengan salah satu atau lebih diantara factor kemasakan, kemampuan belajar, penyesuaian social. b. Pada aspek kepribadian, sdr, Agustinus dwijdjo widodo cendrung kesulitan penyesuian diri, perasaan diri dingin perasaan takut, sikap tanpa perhitungan serta cendurng mengalangi gangguan intelaktual.

Berdasarkan hal tersebut terdakwa dianggap sebagai penyandang disabilitas. Adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 bertempat di Perum IKIP Gununganyar Indah Bloc C No. 100 Kec. Gununganyar Surabaya, terdakwah di suruh menjaga rumah saksi korban liburan ke Australia dan pembantu saksi korban saksi Siatin pulang mudik lebaran. Kemudian terdakwa menduplikat kunci ruang makan dan kunci pintu kamar. Dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan kunci duplikat dan mengambil dua buah jam tangan perempuan merk Ettine Aigner dan merk Citizen. Agar pencurian terkesan dilakukan oleh orang lain terdakwa menjebol plafon rumah yang berada dikamar saksi korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng.

C. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2607/Pid. B/2017/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas

Adapun perbuatan terdakwa Agustinus Dwijdjo Widodo didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Dalam unsur ini terdakwa Agustinus Dwidjo Widodo dapat di mintakan perbuatan hukum di dalam persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan hakim menilai bahwa tidak ada alasan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban hukum terhadap terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa telah menduplikasi kunci dan mencari uang namun tidak mendapatkannya kemudian mencari barang lain berupa dua jam tangan merk Etinne Aigner dan merk Citizen dan membawa barang tersebut ke rumah.

3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Unsur di atas telah di penuhi terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil barang dua jam tangan merk Etinne Aigner dan merk Citizen dan membawa barang tersebut ke rumah.

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Unsur tersebut telah di penuhi oleh terdakwa dengan cara menduplikat kunci yang di serahkan oleh saksi Siatin dan menjebol plafon dengan tujuan agar terdakwa tidak di curigai sebagai pencuri. Dengan begitu terdakwa telah di nyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Dengan adanya deksripsi kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Penuntut Umum menyatakan tuntutan kepada terdakwa Agustinus dwijdjo widodo yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa Agustinus dwijdjo widodo bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
- Menjatuhkan pidana terhadap Agustinus dwijdjo widodo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

- a. 1 (Satu) kotak dus tempat jam tangan merk Etinne Eigner
- b. 1(satu) kotak dus tempat jam tangan Merk Citizen, Dikembalikan kepada saksi korban Moch Oloan Ritonga
- c. 1(Satu) anak kunci gembok pintu pagar
- d. 1(Satu) obeng gagang warna putih bergambar bendera America.
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
 2000,00 (dua ribu rupiah).

Untuk membuktikan dakwaannya sebagai bahan pertimbangan hakim Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan beberapa saksi yaitu:

1. Saksi Herry Prationo

Dalam keterangannya bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 bertempat di Perum IKIP Gununganyar Indah Bloc C No. 100 Kec. Gununganyar Surabaya, saksi didatangi oleh saksi Siatin yang memberitahukan bahwa ada peristiwa pencurian dan kemudian saksi menghubungi pihak keamanan dan mendatangi tempat terebut. Dan sepengetahuannya barang yang dicuri oleh terdakwa adalah dua buah jam tangan merk Etinne Aigner dan merk Citizen

2. Saksi Siatin

Dalam keterangannya memberikan penjelasan bahwa telah terjadi pencurian bertempat di Perum IKIP Gununganyar Indah Bloc C No. 100 Kec. Gununganyar Surabaya, saat itu saksi tidak berada di kediaman tersebut melainkan sedang mudik sejak tanggal 23 Juni

2017. Dan tugasnya digantikan oleh terdakwa. Pada mulanya semua kunci kamar diberikan kepada saksi Siatin oleh majikannya. Kemudian oleh saksi kunci-kunci itu dimasukkan kedalam kamarnya dan mengunci kamarnya sendiri, kunci kamar saksi diletakkan di atas kulkas. Namun pada pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 saksi diberitahu oleh anak kost Putri Hermawati bahwa ada yang mencurigakan dari kelakuan terdakwa Agustinus dwijdjo widodo. Kemudian saksi balik ke rumah majikannya dan mendapati kondisi kamarnya yang sudah berantakan dan kondisi plafon yang telah jebol. Oleh sebab itu saksi memberitahu saksi Herry Prationo untuk melaporkan pihak keamanan.

3. Saksi Moch. Oloan Ritonga

Saksi adalah majikan terdakwa, saat peristiwa pencurian terjadi saksi dihubungi oleh saksi Siatin. Dan segera balik pulang ke Surabaya. Saksi juga membenarkan bahwa dua buah jam tangan merk Etinne Aigner dan merk Citizen adalah miliknya. Sehingga saksi menderita kerugian \pm Rp.7.000.000,00

4. Saksi Ahli

Saksi ahli yaitu Riza Wahyuni, S.Psi, Msi Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Agustinus dwijdjo widodo tanggal 13 November 2017 berdasarkan permintaan dari Yayasan LBH No. Surat 343/SK/LBH/X/2017 Lapas Medaeng dengan waktu sekitar 45 menit. Hasil pemeriksaannya adalah Kapasitas intenlegensi sdr. Agustinus

dwijdjo widodo berada pada kapasitas reterdasi mental ringan, secara fisik tampak sehat dan normal, namun rendahnya fungsi intlektual umum yang terjadi dalam preode perkembangan dan berkaitan dengan salah satu atau lebih diantara factor kemasakan, kemampuan belajar, penyesuaian social. Serta Pada aspek kepribadian, sdr, Agustinus dwijdjo widodo cendrung kesulitan penyesuian diri, perasaan diri dingin perasaan takut, sikap tanpa perhitungan serta cendurng mengalangi gangguan intelaktual.

5. Keterangan Terdakwa

Dalam keterangannya, terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 23 Juni 2017 terdakwa disuruh untuk membersihkan dan menjaga rumah milik saksi Moch. Oloan Ritonga karena ia akan berlibut ke Australia sedangkan pembantunya saksi Siatin sedang mudik. Selanjutnya terdakwa menduplikat kunci dan masuk ke kamar korban dan mencari uang namun tidak ada uang sehingga ia mengambil barang lain yaitu bahwa dua buah jam tangan merk Etinne Aigner dan merk Citizen. Agar perbuatan terdakwa tidak dicurigai terdakwa menjebol plafon menggunakan obeng. Dan mengakui setiap adegan pada foto rekonstruksi saat persidangan.

Selain itu, majelis hakim juga mengadakan musyawarah, mempertimbangkan tuntutan jaksa serta melakukan penilaian terhadap sifat terdakwa selama menjalani proses persidangan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa sopan dalam persidangan
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 Hal-hal yang memberatkan
- a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

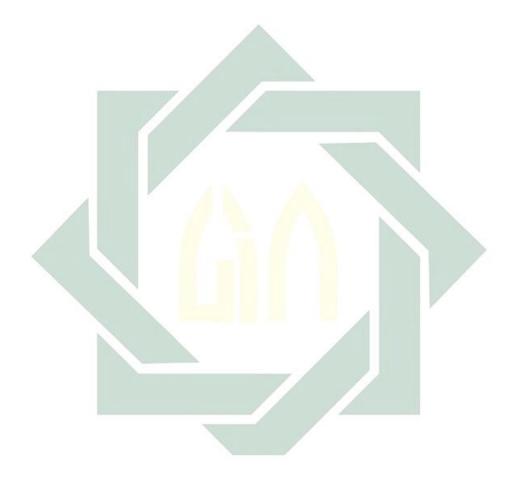
D. Amar Putusan

Setelah hakim mempertimbangkan berbagai hal baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Majelis Hakim pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara tersebut dengan bunyi amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa, Agustinus Dwijo Widodo Bin JC Maniso, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agustinus Dwijo Widodo Bin Jc
 Maniso, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) kotak dus tempat jam tangan merk Etinne Eigner
 - b. 1 (satu) kotak dus tempat jam tangan Merk Citizen Dikembalikan kepada saksi korban Moch Oloan Ritonga
 - c. Satu anak kunci gembok pintu pagar

- d. Satu obeng gagang warna putih bergambar bendera America

 Dirampas untuk di musnahkan
- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000.00 (Dua ribu rupiah)



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO 2607/PID.B/PN.SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No. 2607/Pid.B2017/PN.Sby tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Penyandang Disabilitas

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangaan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Penggadilam Tinggi/ Mahkamah Agung.²⁵

Dalam putusan Nomor 2607/Pid.B2017/PN.Sby menyebutkan bahwa seorang laki-laki penyandang disabilitas bernama Agustinus Dwijo Widodo telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 bertempat di Perum IKIP Gununganyar Indah Bloc C No. 100 Kec. Gununganyar Surabaya, dia di suruh menjaga rumah saksi korban liburan ke Australia dan pembantu saksi korban yaitu Siatin pulang mudik lebaran. Kemudian terdakwa menduplikat kunci ruang

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet v, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), 140

makan dan kunci pintu kamar. Dalam keadaan sepi terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan kunci duplikat dan mengambil dua buah jam tangan perempuan merk Ettine Aigner dan merk Citizen. Agar pencurian terkesan dilakukan oleh orang lain terdakwa menjebol plafon rumah yang berada dikamar saksi korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng. Oleh sebab itu, dia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah terbukti secara sah dan menyakinkan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pidana, lepas maupun bebas.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan Nomor 2607/Pid.B2017/PN.Sby:

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan

- 1. Terdakwa sopan dalam persidangan
- 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana. Dan unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) ke-5 yang meliputi pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan. Hal ini dapat diketahui dari perbuatan terdakwa yang menjebol plafon rumah yang berada dikamar saksi korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng.

Meskipun perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 KUHPidana ayat (1) ke-5. Namun terdakwa adalah penyandang disabilitas serta hakim tidak mempertimbangkan hasil pemerikasaan saksi ahli yang dilakukan oleh Riza Wahyuni, S.Psi, Msi Psikolog dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kapasitas intenlegensi sdr. Agustinus dwijdjo widodo berada pada kapasitas reterdasi mental ringan, secara fisik tampak sehat dan normal, namun rendahnya fungsi intlektual umum yang terjadi dalam preode perkembangan dan berkaitan dengan salah satu atau lebih diantara factor kemasakan, kemampuan belajar, penyesuaian social.
- b. Pada aspek kepribadian, sdr, Agustinus dwijdjo widodo cendrung kesulitan penyesuian diri, perasaan diri dingin perasaan takut,

sikap tanpa perhitungan serta cendurng mengalangi gangguan intelaktual.

Dalam Undang-undang No 8 tahun 2016 pasal 44 ayat (1) juga telah disebutkan bahwa "Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum". Sedangkan Agustinus Dwijo Widodo merupakan penyandang disabilitas dengan retardasi mental ringan sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan mengalami gangguan intelektual.

Oleh sebab itu seharusnya terdapat alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan terdakwa Agustinus Dwijo Widodo. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP bahwa alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu yakni:

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (pasal 44 KUHP)
- b. Umur yang masih muda.

Dengan tidak diterapkannya alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan terdakwa Agustinus Dwijo Widodo maka pengadilan tidak mengacu pada prinsip-prinsip pengadilan yang fair sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas diantaranya hak atas perlakuan yang sama di mata hukum.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No. 2607/Pid.B2017/PN.Sby tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Penyandang Disabilitas

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam :

- d. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- e. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- f. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

Dari ketiga unsure tersebut unsure formal dan unsure material telah terpenuhi kecuali unsure moral yang dalam hal ini bahwa Agustinus Dwijo Widodo merupakan penyandang disabilitas dengan retardasi mental ringan sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan mengalami gangguan intelektual. Sehingga memungkinkan untuk tidak dikenai hukuman potong tangan karena salah saru unsurnya tidak terpenuhi.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas juga mendapatkan sanksi pidana dalam hal ketika pelaku disabilitas memiliki kesadaran yang cukup, dan tahu dampak dari perbuatannya.

Adapun dalam hal cara pembuktian jarimah pencurian yakni adanya saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian sama halnya dengan jumlah saksi pada jarimah sariqah, yaitu minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Saksi bisa diambil dari para korban atau orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian pencurian. Di dalam putusan Nomor 2607/Pid.B2017/PN.Sby telah

dijelaskan bahwa kesaksian diberikan oleh lebih dari dua orang dan satu saksi ahli. Serta adanya keterangan terdakwa. Berdasarkan cara pembuktiannya perbuatan terdakwa telah memenuhi jarimah pencurian dan dapat dihukum potong tangan. Namun mengingat kondisi terdakwa maka hukuman tersebut dapat dihapuskan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis bahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2607/Pid.B2017/PN.Sby tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas telah memenuhi unsure-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat 1 ke-5. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan dang berterus terang. Dan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa yaitu bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- 2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2607/Pid.B2017/PN.Sby tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan tidak terpenuhinya unsure moral dalam jarimah pencurian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Hendaknya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menambah kasanah pengetahuan berkaitan dengan pengklasifikasian pelaku pidana, sehingga sedikit banyak hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam dan bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam penelitian berikutnya.
- 2. Masyarakat lebih mengkaji lagi, dalam praktek sosial masyarakat sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2005
- Djazuli. Fiqh Jinayah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997
- Hanafi, Ahmad. *Azas-azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967
- Ilyas, Amir. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Pukap Indonesia. 2012
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Sihabuddin. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa. tt
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa .Edisi Ke empat. Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia. Jakarta. 2008
- Karjadi, Muhammad dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentator. Bogor: Politea, 1986
- Lamintang, P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987
- M. Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet v. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2004
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Cetakan Keempat*. Jakarta: Kencana. 2014
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta:Imperium.2013
- Rizka Umami. *Makalah: Mencuri dalam Syari'at Islam* (https://zkamiye.blogspot.com), 17 Juni 2013

- Shofiyanah, Noer. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Bagi Pengidap Kleptomania Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana. Skripsi---IAIN Sunan Ampel. Surabaya.1999
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Bogor: Politea, 1995
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010
- Syafi'ie, Muhammad, Purwanti dan Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Sigab. 2014
- Ula, Qonita Nuril. "Analisis Pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska". Skripsi---UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009